

REALISASI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU 2019 DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh: Chandra Dewi Puspitasari, LL.M, Setiati Widiastuti, M.Hum., Iffah Nur Hayati, M.Hum., Puji Wulandari, M.Kn., Eno Wulan Febriana, Arie Setyo Wibowo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk a) mendeskripsikan realisasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, b) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan, kepastian, dan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada penyelenggaraan Pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dari KPU Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta yang ditentukan dengan teknik purposive. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dan data dianalisis menggunakan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) realisasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diwujudkan melalui tahap pra pelaksanaan Pemilu dan tahap pelaksanaan Pemilu. Pada tahap pra pelaksanaan, KPU Kota Yogyakarta melakukan pendataan dan sosialisasi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, KPU Kota Yogyakarta menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas mental. Meskipun ada semangat pemberian hak politik yang seluas-luasnya pada seluruh WNI serta prinsip pemenuhan aksesibilitas pada penyandang disabilitas mental, namun realisasi pemenuhan hak politik tersebut memang belum optimal. b) Beberapa permasalahan yang diidentifikasi yaitu a) Data jumlah penyandang disabilitas mental tidak jelas; b) Kesadaran keluarga akan hak politik penyandang disabilitas mental rendah; c) Keluarga penyandang disabilitas mental tertutup; d) Keterbatasan pengetahuan pantarlih akan pentingnya pendataan penyandang disabilitas mental, dan e) Sosialisasi Pemilu terkait pemenuhan hak politik-hak pilih penyandang disabilitas mental kurang efektif.

Kata Kunci: *pemenuhan, hak politik, penyandang disabilitas mental*